



RAPBD 2023 Terancam Molor

Sambungan dari halaman 1

"Kami akan berupaya supaya tidak molor, karena kalau molor risikonya berdampak pada pembangunan Kalbar, berdampak tidak dibayarkan gaji DPRD dan kepala daerah selama enam bulan," ucap Suriansyah, Senin(24/10).

Menurutnya, dalam pembahasan APBD 2023 memang diperlukan sinergi semua pihak. Kedua belah pihak (eksekutif dan legislatif) harus bertekad menyelesaikan pembahasan bersama-sama. "Kalau salah satu pihak tidak fokus, akan berdampak tidak disahkannya APBD," ujarnya.

Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Kalbar terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 dipastikan akan dijadwalkan ulang.

Terpisah, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan bahwa penundaan rapat paripurna yang terus menerus dikhawatirkan akan mengganggu jadwal pengesahan APBD. "Penetapan APBD terakhir itu, adalah 30 November 2022. Belum sih terganggu, namun ka-

lau ditunda terus bisa jadi penetapan APBD molor," ucapnya.

Nah, apabila sampai batas akhir yakni 30 November belum juga diketok palu, maka bakal berlaku aturan lain yaitu APBD Kalbar disahkan melalui Perkada. Norsan menyebutkan, dalam hal ini hendaknya tidak saling salah-menyalahkan.

"Susah juga mau saling salah-menyalahkan. Kemarin tak cukup kuorum, dari dewan juga tak cukup, kalau saya bicara salah pula saya," katanya dengan nada hati-hati.

Mantan Bupati Mempawah dua periode ini menyampaikan bahwa eksekutif dan legislatif harus memperbaiki komunikasi. Salah satu caranya adalah dengan agenda coffee morning bersama. Antara eksekutif dan legislatif dapat duduk bersama memecahkan persoalan.

Pekan lalu, DPRD Kalbar sudah menunda Rapat Paripurna terkait Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat paripurna ditunda lantaran peserta tidak mencapai kuorum alias syarat kehadiran anggota DPRD Kalbar tidak terpenuhi. Ses-

uai tata tertib, rapat paripurna tidak dapat berlanjut. Sekda Kalbar, Harisson ketika itu menyampaikan bahwa paripurna sedianya akan digelar dengan agenda Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Kalbar sebelumnya. "Karena tidak korum, kembali dilanjutkan Senin 24 Oktober," kata Harisson. Menurutnya, jika jawaban gubernur bisa dibacakan, maka pembahasan Raperda APBD bisa dilanjutkan dengan pembahasan per komisi.

Beberapa hari sebelumnya, Rapat Paripurna lanjutan Jawaban Gubernur Kalbar terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 berlangsung alot dan panas. Para wakil rakyat silih berganti memberikan kritik disebabkan ketidakhadiran Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Termasuk soal tidak adanya perwakilan dari Wakil Gubernur atau Sekda Kalbar pada Rabu(5/10). Padahal dua hari sebelumnya, delapan fraksi di DPRD Kalbar sudah sepakat menyetujui pembahasan bersama RAPBD 2023. (den)

PARIPURNA DPRD

RAPBD 2023 Terancam Molor

HUBUNGAN panas antara eksekutif dan legislatif di Kalimantan Barat masih berlanjut. Rapat Paripurna terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 kembali gagal dilaksanakan. Pengesahan APBD 2023 pun terancam molor.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah juga mengaku khawatir pengesahan APBD Kalbar tahun 2023 akan melenceng dari jadwal. Namun, kata dia, batas waktu pengesahan APBD masih tersisa 40 hari ke depan.

◆ Ke Halaman 7 kolom 5